

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kosmologi kehidupan tidak akan terlepas dari masalah. Permasalahan yang terjadi bisa terjadi karena sudah menjadi ketetapan alam atau suatu konsekuensi dari perbuatan manusia itu sendiri. Asumsinya adalah karena sesuatu yang diciptakan maka apa yang diciptakan itu tidak akan pernah sempurna. Ketidaksempurnaan inilah yang kemudian menjadi suatu masalah. Hakikat kesempurnaan adalah yang menciptakan ketidaksempurnaan. Beranjak dari filosofis ini, proses penelitian ini akan diuraikan, yang tidak akan terlepas dari segala kekurangan.

Kompleksitas masalah pembangunan bangsa merupakan masalah rumit yang susah untuk diuraikan. Berbagai permasalahan mulai dari *political will* pemerintah, penyebaran penduduk, anggaran pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Segala permasalahan ini terakumulasi dan jangan sampai menjadi sebuah *kepasrahan kolektif* yang tidak pernah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Masalahnya adalah bagaimana menghadapi berbagai persoalan bangsa ini dengan cermat tepat dan berdaya guna sehingga mampu meningkatkan derajat kehidupan bangsa.

Permasalahan bangsa dari dulu tidak beranjak dari masalah anggaran yang menjadi pokok permasalahan. Padahal kalau mau berpijak dan bersungguh-sungguh untuk membangun meningkatkan kemampuan bangsa, secara *gradual*,

kontinyu, dan berkeadilan yang dilandasi moralitas yang baik pembangunan bangsa ini akan lebih maju di masa depan. Kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bisa diwujudkan. Saat ini bangsa kita patut bersyukur karena pemerintah telah memenuhi alokasi anggaran pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaan anggaran ini harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hingga dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan, peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pengajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih sangat memprihatinkan. Permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan khususnya dalam pembangunan SDM di Indonesia tidak akan pernah selesai. Dari mulai sistem pendidikan yang bermasalah, tenaga kependidikan yang kurang berkualitas sarana pendidikan yang kurang memadai, pemerataan pendidikan di wilayah Indonesia, sampai pada mutu lulusan yang kurang bermutu. Disparitas antara tujuan pendidikan dengan

kondisi pendidikan di lapangan menyebabkan masih rendahnya kualitas SDM Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Peningkatan kualitas SDM selain dilakukan pada pendidikan jalur formal dikembangkan juga jalur informal dan nonformal. Pendidikan dalam jalur nonformal diselenggarakan dalam bentuk pelatihan, kursus, kejar Paket A, B dan C serta program-program lainnya. Pemberdayaan dan pengembangan program pelatihan khususnya bagi para pemuda merupakan sebuah program alternatif yang harus terus dikembangkan. Pelatihan ini mempunyai peranan yang cukup strategis karena dengan komposisi kuantitas pemuda yang besar merupakan potensi yang harus terus dikembangkan. Sehingga bila bidang kepemudaan ini bisa berkembang dengan baik akan menghasilkan proses percepatan perbaikan dan peningkatan SDM. Penulis mencoba akan mengkaji tentang permasalahan kepemudaan ini khususnya dalam bidang pelatihan kepemudaan. Degradasi moral yang baru-baru ini terjadi dikalangan remaja merupakan suatu bentuk lemahnya integritas jati diri dan jiwa pemuda. Sehingga peranan pemuda dalam masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi pada lingkungan masyarakatnya, yang ada hanya menjadi sebuah beban. Fenomena ini sungguh mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa. Pembinaan terhadap peranan pemuda menjadi sesuatu yang penting karena akan berkaitan dengan masa depan bangsa.

Intelektual kaum muda dan bidang kepemudaan sebagai bagian dalam penelitian ini serta sebagai bagian integral dari komponen bangsa masih memunculkan berbagai permasalahan. Masih sering terdapat berbagai tindakan kriminal dan tindakan asosial yang dilakukan pemuda bahkan dilakukan oleh

kalangan intelektual. Tindakan-tindakan yang destruktif ini sepatutnya menjadi bahan pemikiran dan dicarikan solusi agar tidak terjadi dan dapat diminimalisir. Kaum pemuda sebagai garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa diharapkan dapat berperan serta dalam proses pembangunan bangsa.

Program pembinaan dan pembangunan kepemudaan sebagai bagian dari program pembangunan nasional diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam usaha pemerintah dalam membangun bidang kepemudaan. Program pembangunan ini diharapkan dapat didukung oleh masyarakat sehingga dapat menghasilkan pemuda harapan bangsa. Sebuah keniscayaan bagi sebuah bangsa bila membiarkan pemuda berada dalam kondisi terburuk dan tidak diperhatikan, bila ini terjadi akan merugikan bangsa di masa datang. Karena generasi penerus akan dipimpin oleh kaum muda yang tidak kompeten dan tidak profesional.

Pencerdasan kehidupan bangsa sebagai cita-cita mulia yang digagas para pemimpin bangsa sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: (1) Setiap warga Negara berhak untuk memperoleh pendidikan; (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memuat bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya dalam Pasal 27 mengungkapkan tentang pendidikan nonformal sebagai bagian dari Sisdiknas Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat yang berfungsi berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Bidang pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Realitas pendidikan di Indonesia pada umumnya belum mampu menghasilkan *out put* yang bermutu. Mutu pendidikan yang rendah ikut andil dalam mempengaruhi daya saing bangsa dalam skala internasional maupun nasional. Rendahnya daya saing mengakibatkan tingginya angka pengangguran,

rendahnya produktivitas kerja, dan munculnya kerawanan sosial. Platform pendidikan nasional seperti yang tersirat dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) seharusnya menjadi paradigma dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan nasional yang bersifat adaptif, tidak bersifat sentralistik. Kerangka otonomi dalam pendidikan yang selama ini telah berjalan harus diteruskan dan diperbaiki sehingga mampu menghasilkan lulusan sekolah yang bermutu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan suatu investasi jangka panjang sebagai proses pembentukan kualitas manusia yang mampu melakukan tindakan-tindakan konstruktif dalam kehidupannya. Proses pembangunan nasional dalam bidang pendidikan seperti yang digariskan dalam bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam membangun tatanan kehidupan bangsa yang adil dan makmur.

Muhammad Nuh mengungkapkan konsep dasar dari rencana kerja Departemen Pendidikan Nasional pada 2010 akan bertumpu pada pondasi kebijakan nondiskriminatif dan pendidikan untuk semua (*education for all*). Kedua pondasi tersebut terdiri dari lima pilar pencapaian tujuan, yaitu pilar ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, serta keterjaminan. (Kompas.com, 3 Desember 2009). Permasalahan yang cukup mendasar dalam

Sisdiknas adalah kualitas pendidikan yang masih rendah dan pemerataan pendidikan di wilayah Indonesia.

Program yang digulirkan Mendiknas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Ketinggalan dari bangsa lain janganlah dijadikan sebagai persepsi negatif, tetapi jadikan pendorong untuk menjadikan pendidikan lebih baik dan berkualitas sehingga setahap demi setahap mampu mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan solusi alternatif dalam memperbaiki pendidikan nasional sebagaimana diungkapkan Surya (2007) yaitu: (1) kemauan dan komitmen politik pemerintah dalam bidang pendidikan. Alhamdulillah hal ini telah tercermin dengan lahirnya undang-undang pendidikan; (2) Paradigma pendidikan, pandangan pendidikan yang selama ini terbatas pada sekat-sekat ruang kelas yang dibatasi tembok kelas harus segera di rubah. Pendidikan sebagai proses belajar sepanjang hayat; (3) Anggaran pendidikan, usaha pemerintah dalam memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD semoga dapat menjadi modal dalam perbaikan pendidikan; (4) Profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, respon terhadap program sertifikasi guru telah cukup baik terutama dalam peningkatan kesejahteraan guru walaupun belum dapat direalisasikan seluruhnya. Tetapi aspek peningkatan kualifikasi dan kualitas guru perlu mendapat perhatian dengan melakukan evaluasi secara berkelanjutan sehingga mampu menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan profesional; (5) Otonomi pendidikan, pola sentralitis dalam pengelolaan pendidikan harus dirubah dengan

memberikan otonomi yang luas bagi daerah dalam pengelolaan pendidikan; (6) Keseimbangan penyelenggaraan; (7) Partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat dalam proses pendidikan harus terus didorong sehingga dapat bersinergi baik dengan pemerintah maupun lembaga pendidikan dalam mengembangkan pendidikan di semua jenjang pendidikan.

Berkaitan dengan ini bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin berat karena arus informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah segala sendi kehidupan dengan begitu cepat. Kenyataan yang demikian telah mendorong bangsa Indonesia untuk berbuat lebih baik dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menyongsong perubahan dan tantangan tersebut. Kualitas memegang peranan yang amat penting dalam rangka mengikuti kemajuan arus informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping salah satu sumber daya yang vital dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia seperti yang telah dikemukakan di atas, tidak dapat dipisahkan dengan peran lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan yang bersifat formal maupun informal. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut diharapkan dapat memegang peranan penting yang besar dalam membentuk watak bangsa serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, juga diharapkan mampu memberikan bekal kepada peserta didiknya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lembaga pendidikan tersebut benar-benar dapat memberikan sumbangan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Keterpurukan kualitas manusia suatu bangsa akan berdampak besar dalam menghadapi pembangunan di masa yang akan datang. Ketertinggalan bangsa kita dari bangsa yang sudah maju sangat sulit untuk dikejar. Sehingga bangsa kita hanya menjadi area konsumen untuk produk-produk dari bangsa lain. Dalam bidang pembangunan hal ini merupakan sebuah indikasi yang negatif. Rasio kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak dengan cepat bila tanpa diimbangi dengan sumber daya yang handal, maka bangsa Indonesia masih tetap akan menjadi negara tertinggal. Permasalahan makro bangsa Indonesia semakin bertitik tolak pada masih minimnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya produktifitas bangsa.

Tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan senantiasa berpacu dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Perkembangan IPTEK yang berkembang dengan pesat. Sebuah keniscayaan bagi pendidikan untuk melakukan berbagai langkah restrukturisasi sistem pendidikan nasional. Restrukturisasi ini perlu dilakukan mengingat tingkat kualitas pendidikan kita masih rendah dan sudah tertinggal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia berdasarkan laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2008 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat 107 di dunia. Negara-negara Asia Tenggara lain bahkan jauh meninggalkan Indonesia. Singapura berada pada peringkat 25, Brunei Darussalam peringkat 30, dan Malaysia di peringkat 63. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Acuan penilaian IPM merupakan akumulasi dari tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan masyarakat Indonesia. Datanya menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah cukup tinggi terutama pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan, sedangkan untuk pendidikan pada jenjang perguruan tinggi APK nya masih rendah hanya 17,25%.

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Kelompok Usia	Penduduk Usia Sekolah	Siswa/ Mahasiswa	APK %
1.	PAUD	0-6 tahun	29.847.830	15.109.682	50,62
2.	TK+RA	4-6 tahun	10.076.448	3.584.338	35,57
3.	SD+MI+Paket A	7-12 tahun	26.304.320	30.384.766	115,51
4.	SMP+MTs+ Paket B	13-15 tahun	12.890.334	11.900.783	92,32
5.	SM+MA+Paket C	16-18 tahun	12.897.898	7.804.134	60,51
6.	PT+PTAI+PTK	19-24 tahun	25.077.900	4.325.354	17,25

Sumber : Ikhtisar Data Pendidikan Nasional 2007/2008

Diharapkan dengan adanya anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD pemerintah mampu memberikan pelayanan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Pelayanan pendidikan tersebut dapat berupa pemerataan dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Pemerataan dalam bidang pendidikan diharapkan mampu membentuk SDM bangsa yang profesional dan berkualitas, sehingga di masa mendatang sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang telah lebih maju.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Tingginya angka penganggur berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan.

Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran di negara kita adalah banyaknya tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal. Selain hal tersebut besar jumlah penduduk yang tanpa diimbangi dengan kualitas SDM yang baik, semakin menambah permasalahan sosial di bidang sandang, pangan, dan papan, dan akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Berdasarkan UU Kepemudaan yang menyatakan bahwa rentang usia pemuda adalah 16 sampai 30 tahun, dari data di atas dapat dilihat jumlah penduduk dengan kategori usia pemuda kurang lebih enam 60 juta jiwa atau

sekitar 29% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini cukup besar dan membutuhkan penanganan yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan masyarakat.

Degradasi moral yang baru-baru ini terjadi dikalangan remaja merupakan suatu bentuk lemahnya integritas jati diri dan jiwa pemuda. Sehingga peranan pemuda dalam masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi pada lingkungan masyarakatnya, yang ada hanya menjadi sebuah beban. Fenomena ini sungguh mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa. Pembinaan terhadap peranan pemuda menjadi sesuatu yang penting karena akan berkaitan dengan masa depan bangsa. Program pelatihan khususnya bagi para pemuda merupakan sebuah alternatif yang harus terus dibina. Komposisi kuantitas pemuda yang besar merupakan potensi yang harus terus dikembangkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pemuda di Indonesia diantaranya: (1) ketidakjelasan masa depan bagi kaum muda adalah bekerja dan berkeluarga, mencukupi kebutuhan dasar; (2) ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, berkembang begitu cepat dan mahal banyak yang tidak mampu memasukinya, terutama karena biaya yang sangat mahal; (3) keterbatasan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta nihilisme pendapatan; (3) ketidakpercayaan kepada sistem politik dan pemerintahan; (4) kegamangan akan nilai-nilai lama dan kegagapan atas nilai-nilai baru; (5) kehilangan kepercayaan kepada kelompok tua; (6) ideologi kaum muda tidak bisa lagi dilekatkan dengan semangat kesatuan dan persatuan, karena itu diluar permasalahan yang dihadapi oleh kaum muda itu sendiri (<http://indrapilliang.com>, 21 Januari 2009).

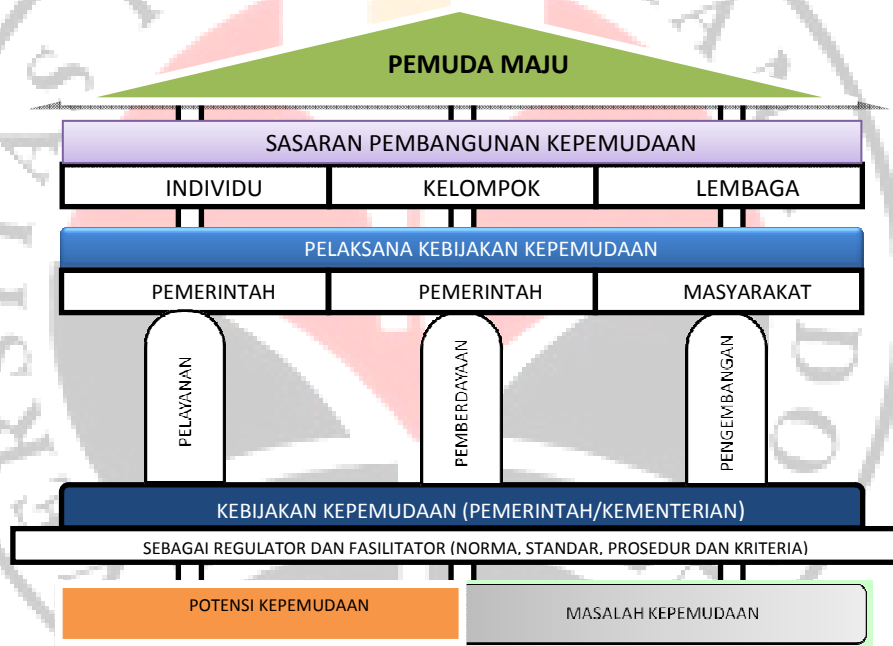
Iskandar (2009) dalam prosesi pemilihan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi pemuda antara lain:

1. Mis-orientasi pemuda dalam menghadapi masa depan;
2. Rendahnya akses dan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan;
3. Rendahnya minat membaca pemuda yang hanya mencapai 37%;
4. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 65,9%;
5. Belum serasnya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah;
6. Tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda yang mencapai 19,5%;
7. Maraknya masalah sosial di kalangan pemuda (kriminalitas, narkoba, premanisme, HIV, dan lainnya);
8. Ancaman harga diri pemuda akibat adanya terorisme;
9. Penyaluran aspirasi pemuda yang cenderung destruktif.

Sebagai respon atas permasalahan pemuda maka harus di pikirkan bentuk-bentuk pemecahan yang mungkin dapat dilakukan, sehingga dapat meminimalisir permasalahan di kalangan pemuda. Salah satu bentuk solusinya adalah dengan mengembangkan bentuk pelatihan dibidang kepemudaan. Pelatihan kepemudaan ini dapat berupa pelatihan keterampilan, manajemen organisasi, maupun bidang lain yang dapat membekali pemuda dalam berkiprah dalam kehidupan masyarakat.

Peran-peran kepemudaan dalam kehidupan masyarakat harus secara terus menerus ditumbuhkembangkan sehingga mampu berkontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 3 UU Kepemudaan menyatakan bahwa: Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sungguh besara peranan bagi pemuda seyoginya amanat UU ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan pembangunan kepemudaan di Indonesia.



Gambar 1.1 Pembangunan Kepemudaan Nasional
 Sumber : Kebijakan Pembangunan Kepemudaan (2009: 30)

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan tentang pendidikan informal yang salah satunya merupakan program pelatihan. Pasal 26 ayat (3) dijelaskan meliputi Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan

Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ruang lingkup peraturan ini dengan eksplisit menjelaskan program pelatihan kepemudaan merupakan salah satu program yang dirancang pemerintah untuk mendukung proses pembangunan manusia yang berkualitas. Proses untuk mewujudkan ini tidaklah mudah, butuh sumber daya baik berupa materil maupun non-materil. Proses inilah yang banyak menjadi bahan kajian penelitian untuk menemukan metode ataupun, solusi dari masalah-masalah yang ada dalam bidang pendidikan.

Struktur masyarakat, pemuda merupakan komponen terbesar. Pemuda sebagai salah satu komponen bangsa yang mempunyai posisi yang strategis merupakan energi potensial yang harus digerakan dalam mendukung program pembangunan bangsa khususnya dalam masyarakat sehingga mampu membawa perubahan yang lebih baik. Posisi yang strategis ini dikarenakan pemuda sebagai generasi penerus pembangunan mempunyai karakter tersendiri, dimana pemuda mempunyai dinamika yang dinamis baik dalam pemikiran, pergaulan, dan fisik yang mendukung. Potensi pemuda ini jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bersifat destruktif karena dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu diperlukan suatu program yang dapat menstimulasi pemuda ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan program kepemudaan yang sistematis. Program kepemudaan ini dapat berupa pengembangan keterampilan ataupun pengembangan dalam bidang

sikap (*attitude*) sehingga pemuda mampu menjadi pengayom dan pembimbing dalam masyarakat serta menjadi garda utama dalam pembangunan.

Peranan pemuda dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia memang bersifat dominan dan monumental. Di era pra-kemerdekaan maupun di era kemerdekaan, pemuda selalu tampil dengan jiwa kepeloporan, kejuangan, dan patriotismenya dalam mengusung perubahan dan pembaharuan. Karya-karya monumental pemuda itu dapat ditelusuri melalui peristiwa bersejarah antara lain; Boedi Oetomo (20 Mei 1908) yang kemudian diperingati sebagai Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945), transisi politik 1966, dan Gerakan Reformasi 1998.

Peristiwa lahirnya Boedi Oetomo 1908 menjadi bukti bahwa pemuda Indonesia memiliki inisiatif untuk mengubah peradaban bangsanya. Ketika itu, menyaksikan metoda perjuangan kemerdekaan yang masih mengandalkan sentimen kedaerahan (*ethnosentrisme*), pemuda berinisiatif untuk mengubah strategi perjuangan kemerdekaan dalam konteks peradaban yang lebih maju, yakni dengan memasuki fase perjuangan berbasis kesadaran kebangsaan (*nasionalisme*), untuk menggantikan semangat kedaerahan yang bersifat sporadis dan berdimensi sempit. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, pemuda kembali menunjukkan perannya sebagai pengubah peradaban bangsa. Sumpah Pemuda merupakan fase terpenting yang dicetuskan pemuda dalam prosesi kelahiran *nation-state* Indonesia. Secara prinsip, Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan sosial (*social agreement*) dari segenap komponen rakyat demi melahirkan entitas “Indonesia”. Halmana disusul oleh kesepakatan politik Para Pendiri Bangsa berupa Proklamasi

Kemerdekaan 1945 yang melahirkan negara Indonesia merdeka yang berbasiskan pada *platform* dasar: NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Di setiap babak sejarah bangsa ini, pemuda selalu berusaha mempertahankan idealisme kejuangan dan militansi gerakannya. Seusai kemerdekaan, pemuda secara konsisten tetap berikhtiar dan berperan dalam menentukan hitam-putihnya masa depan negeri ini. Dalam era pembangunan yang ditandai oleh beberapa kali pergantian rezim kekuasaan, pemuda menunjukkan *bargaining position* yang kuat, termasuk ketika Indonesia memasuki era transisi demokrasi bernama gerakan reformasi. Sejarah pergerakan nasional telah membuktikan bahwa pemuda memiliki posisi dan peran strategis dalam mengubah peradaban bangsanya. Pembangunan kepemudaan merupakan pilar bangsa yang amat penting untuk menguatkan pembentukan karakter bangsa (*nation character building*).

Program peningkatan kualitas kepemudaan telah mendapatkan perhatian di kalangan pemerintah khususnya di Propinsi Jawa Barat. Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menempatkan peningkatan sumber daya manusia pada isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat. Hal ini tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat yang mengungkapkan adanya upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Propinsi Jawa Barat dengan peningkatan sarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga guru, serta mengembangkan program pendidikan non-formal seperti SMP Terbuka, Kelas Jarak Jauh. Pengembangan program non-formal ini lebih menitikberatkan pada peran serta masyarakat dengan dukungan dari pemerintah. Peranan pemuda pun secara

implisit terdapat dalam program pembangunan Jawa Barat yang termasuk dalam pengembangan pendidikan non-formal.

Gambaran pemuda Indonesia yang diharapkan sebagaimana dijabarkan dalam kebijakan program Menpora adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keserasian kebijakan pemuda dalam bidang pembangunan.
2. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan.
3. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan.
4. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan.
5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

Solusi dalam mengatasi permasalahan kepemudaan sebagaimana di kemukakan di atas adalah dengan mengembangkan program-program pelatihan kepemudaan. Salah satu program yang dikembangkan adalah dengan program pendidikan dan pelatihan kepemudaan yang diselenggarakan di GGM Bandung. Program kepemudaan GGM Bandung ini sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan kepemudaan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan gambaran umum dalam ruang lingkup bidang dan variabel penelitian sehingga penelitian menjadi terarah. Beranjak dari judul penelitian *Studi Tentang Kurikulum Transaktif dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan di Gelanggang Generasi Muda Bandung*, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemudaan di Gelanggang Generasi Muda Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemudaan di Gelanggang Generasi Muda Bandung?
3. Bagaimana evaluasi kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemudaan di Gelanggang Generasi Muda Bandung?
4. Bagaimana kendala, kelebihan, dan kekurangan kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemudaan di Gelanggang Generasi Muda Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan analisis kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemudaan pada Gelanggang Muda Bandung yang diharapkan dapat memberikan stimulus dalam pemberdayaan bidang kepemudaan pada umumnya.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Perencanaan kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemudaan di Gelanggang Generasi Muda Bandung.
2. Pelaksanaan kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemudaan di Gelanggang Generasi Muda Bandung.
3. Evaluasi kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemudaan di Gelanggang Generasi Muda Bandung.

4. Untuk mengetahui kendala, kelebihan, dan kekurangan kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemudaan di Gelanggang Generasi Muda Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan dan rumusan dalam mengembangkan pendidikan dan pelatihan bidang kepemudaan di Kota Bandung khususnya, umumnya kalangan kepemudaan di tanah air. Secara khusus penelitian manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara praktis:

- a. Memberikan deskripsi, informasi dan masukan bagi Kepala GGM Bandung dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan kepemudaan.
- b. Membangun konsepsi dasar bagi peneliti sebagai pengalaman praktis dalam terjun di masyarakat.
- c. Bahan masukan dalam perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kepemudaan di masyarakat.
- d. Membangun wacana tentang kepemudaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Secara teoritis:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan bagi studi pengembangan kepemudaan di Indonesia.

- b. Bahan kajian bagi pihak pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan bidang kepemudaan.
- c. Bahan studi bagi mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan yang akan melakukan kajian, riset bidang pendidikan dan pelatihan kepemudaan.

E. Asumsi Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Gelanggang Generasi Muda Bandung sebagai wadah aktifitas dan pengembangan bidang kepemudaan dengan segala aktifitas dan kegiatannya telah menjadikan lembaga ini menjadi yang terdepan dalam mewadai aktifitas dan pengembangan kepemudaan di Propinsi Jawa Barat khususnya kota Bandung.
2. Pembangunan pemuda mempunyai peran yang strategis sehingga perlu dikembangkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
3. Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemudaan sebagai bagian dari pendidikan memberikan solusi alternatif pengembangan SDM.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebaia cara yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian. Ketepatan penggunaan metode penelitian akan menghasilkan

penelitian yang tepat pula, sehingga kesimpulan penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini memusatkan perhatian pada pengamatan peneliti dalam berinteraksi dengan objek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik sebagai metode penelitian untuk menganalisa, meneliti masalah yang terjadi saat ini. Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

G. Lokasi dan Sampel Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gelanggang Generasi Muda Bandung Jl. Merdeka No.64 Bandung

2. Sampel penelitian

Sampel dalam penelitian Studi Tentang Kurikulum Transaktif dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan di GGM Bandung ini adalah: Kepala GGM Bandung, Kepala PPKIJ Lokal Bandung, Staf GGM Bandung, Instruktur diklat kepemudaan, dan alumni diklat kepemudaan GGM Bandung.